

BAB III

TRANSFORMASI SOSIAL DAN EKONOMI BANJAR PADA AWAL TERBENTUKNYA KOTA DI TAHUN 2003 – 2008

3.1 Kehidupan Sosial Masyarakat Menuju Pemerintahan Otonomi Daerah

Daerah yang dapat melaksanakan otonomi daerah memiliki ciri utama yaitu memiliki kewenangan dalam menggali sumber keuangan, menggunakan dan juga mengelola keuangan tersebut untuk kegiatan pemerintahan, dan memiliki ketergantungan terhadap dana transfer seminim mungkin.³¹ Konsep Desentralisasi bertujuan agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki sebuah kewenangan dalam mengatur pemerintahannya sendiri sehingga dapat dilihat apakah konsep desentralisasi mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah dengan melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Beberapa persoalan utama yang sering dihadapi oleh Daerah Otonomi Baru (DOB) pasca pemekaran ialah mengenai kesulitan dalam aspek keuangan dalam membiayai pembangunan. Daerah Otonomi Baru ini mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan membangun segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan daerahnya, seperti aspek infrastruktur dan aspek pelayanan publik lainnya. Dalam akselerasi percepatan Pembangunan tersebut dapat membuka peluang yang lebih besar bagi Daerah Otonomi Baru agar meningkatkan Pembangunan di bidang ekonomi. Akan tetapi, percepatan pembangunan tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dengan kata lain memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Terlebih dengan terbentuknya pemerintahan baru, anggaran untuk membiayai pemerintahan daerah seperti dalam belanja operasional pemerintahan maupun hal belanja pegawai akan mengalami sedikit perubahan sehingga disana diperlukan adanya penyesuaian dari pemerintahan dalam Daerah Otonom itu sendiri.³²

³¹ Fitra, H. (2014). *Analisis Pendapatan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintahan Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran*. Jurnal WRA hlm.372

³² Sutojo, A. (2015). *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. hlm 1-15.

Pertumbuhan jumlah penduduk dari Kota Banjar yang kian bertambah dari tahun ke tahun ke tahun, sehingga memunculkan sebuah permasalahan baru yaitu pengangguran dan lain sebagainya. Berikut ini data terkait jumlah pertumbuhan penduduk dari Kota Banjar yang terus bertambah, dalam kurun waktu 5 tahun terhitung sejak 2004-2008 :

Tabel 2.5 Jumlah kependudukan warga masyarakat Kota Banjar 2004-2008

No.	Kecamatan	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Banjar	46.096	46.338	46.624	46.892	47.149
2.	Purwaharja	18.640	18.682	18.712	18.761	18.793
3.	Pataruman	49.279	49.648	49.790	49.895	49.962
4.	Langensari	46.795	47.558	48.147	48.694	49.153

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar 2004-2008

Tabel tersebut merupakan jumlah penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir terhitung sejak 2004-2008. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, jumlah penduduk Banjar dari tahun ke tahun mengalami jumlah peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini juga menambah beban bagi Pemerintah Kota Banjar, seperti aspek pelayanan kepada masyarakat juga harus ditambah baik itu dalam hal pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Pemekaran Daerah atau Peningkatan Status menjadi daerah otonom baru pada umumnya diharapkan nantinya bisa mampu menjadikan daerah tersebut bisa lebih mandiri. Namun dalam hal tersebut pula, terdapat beberapa proses yang tidak berjalan dengan lancar, salah satunya adalah konflik sosial di masyarakat. Konflik yang terjadi di masyarakat menuju daerah otonom ini biasanya dipengaruhi oleh perbedaan pendapat mengenai perlu atau tidak nya pemekaran daerah atau peningkatan status ini bisa dilakukan. Seperti yang dialami oleh Kota Banjar. Kota Banjar atau dulu bentuk nya masih Kota Administratif Banjar, terjadi perbedaan pendapat mengenai pemekaran Banjar ini dilakukan.

Menurut hasil penelusuran dengan cara melakukan survei ke lapangan dan juga wawancara , ditemukan bahwa telah terjadi konflik yang disebabkan oleh ketakutan dari sebagian masyarakat Banjar akan hidup yang lebih susah dan kesulitan jika harus keluar dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Ciamis dan mnjadi

daerah otonom baru. Mereka berpandangan bahwa semasa Banjar masih berstatus Kewadanan lalu ditingkatkan menjadi Kota Administratif pada tahun 1992, dan akan ditingkatkan lagi menjadi daerah otonom baru, namun belum ada perubahan status pemerintahan. Ketika wilayah menjadi semakin luas, resiko akan terjadinya konflik spasial bila terjadi, hal ini erat kaitannya dengan seperti masalah kependudukan dan batas-batas wilayah yang semakin besar. Konflik wilayah ini muncul akibat pemekaran wilayah dapat memiliki dampak terhadap sektor perekonomian, politik, sosial dan budaya yang signifikan.³³

Terdapat beberapa Kecamatan yang ada di Kota Administratif Banjar, menolak dengan keras usulan atau rancangan terkait dengan peningkatan status Banjar ini menjadi daerah otonom. Mereka beranggapan bahwa jika peningkatan status Banjar ini dilakukan seakan terburu-buru, di tengah sarana prasarana belum memadai termasuk minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjar, mereka mengkhawatirkan malah akan menjadi beban masyarakat secara keseluruhan. Kecamatan paling lantang yang menyuarakan penolakan ini ada di sekitar Kecamatan Langensari. Hasil tersebut sesuai dengan wawancara dengan tokoh masyarakat Banjar sekaligus beliau juga sebagai mantan Wali Kota Banjar, DR. dr. H. Herman Sutrisno M.M. Beliau menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelompok dari salah satu kecamatan, mereka menentang dengan cara menyuarakan penolakannya terkait peningkatan status Kota Administratif Banjar. Bahkan terdapat ancaman jika Kota Banjar tidak maju dalam lima tahun ke depan dan permasalahan jadi semakin bertambah, rumah beliau Dr. dr. Herman akan dibakar sebagai jaminannya.³⁴ Namun atas berkat dialog dan juga musyawarah dengan masyarakat setempat, hal tersebut urung dilakukan, dan Dr. dr. Herman Sutrisno membuktikan dengan mengutamakan pembangunan di Kecamatan Langensari. Pembangunan yang telah dilakukan seperti pembangunan sarana dan prasarana olahraga Sport Center, lalu ada jembatan layang, revitalisasi taman Kota Langensari, dan jembatan baru sebagai penghubung menuju Provinsi Jawa Tengah.

³³ Muksin, D., Robo, S., dkk (2021). *Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua*. Jurnal Pemerintahan hlm 270-281.

³⁴ Wawancara Dr.dr. H. Herman Sutrisno (75 tahun). *Mantan Wali Kota Banjar periode 2003-2013*. 11 November 2025.

Pernyataan dari Dr. dr. Herman Sutrisno M.M tersebut juga didukung oleh hasil penelusuran penulis dengan meminta keterangan dari Sekretaris Presidium saat itu, Ir. Soedrajat. Beliau menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi ketika keinginan masyarakat Banjar yang menginginkan perpisahan dari Kabupaten Ciamis dan mendeklarasikan sebagai daerah otonom baru, harus sedikit terhalang oleh beberapa aksi masyarakat yang menolak berdirinya daerah otonom baru. Seperti aksi dari Gerakan Rakyat Anti Miskin (GRAM) yang diinisiasi oleh Didi S.E, ungkap sekretaris jendral Forum Peningkatan Status Kotif Banjar, Ir. Soedrajat atau acap kali orang-orang menyebut Ajat Doglo. Dalam sesi wawancara tersebut, beliau menjelaskan adanya ketakutan dari sebagian elemen masyarakat jika harus lepas dari pemerintahan Kabupaten Ciamis, baik jika dilihat dari kondisi pendapatan asli daerah yang seadanya, juga kondisi masyarakat dan infrastruktur yang serba terbatas. Mereka beranggapan bahwa, memisahkan diri dari wilayah induknya, Kabupaten Ciamis akan memperburuk keadaan yang ada di Banjar, baik dari segi aspek sosial maupun aspek ekonominya. Bahkan berita mengenai pro dan kontra dari masyarakat Banjar ini diliput dan disaksikan oleh media Kabar Priangan. Berita yang muncul tertanggal 8 Juni 2002 tersebut memberitakan bahwa terjadi pro dan kontra di masyarakat terkait peningkatan status yang ada di Banjar. Sebagian masyarakat tersebut membentuk suatu organisasi atau komunitas tandingan guna menggagalkan upaya peningkatan status yang dilakukan oleh Forum Peningkatan Status Kota Administratif Banjar (FPSKB).³⁵

Beban cukup berat harus dirasakan oleh Wali Kota Banjar pertama yaitu Dr. dr H. Herman Sutrisno M.M. pasalnya pada saat mengawali masa pemerintahannya, pada saat terpilih menjadi Wali Kota pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banjar ternyata tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan dan juga pembangunan Kota Banjar dengan waktu yang sangat singkat setelah Banjar memisahkan diri dari wilayah induknya yaitu Kabupaten Ciamis. Menurut Marzuki dalam penelitian Elyawati, menyebutkan bahwa secara prinsip kewenangan otonomi daerah yang diberikan kepada suatu

³⁵ Wawancara Ir. Soedrajat (52). Sekretaris Forum Peningkatan Status Kota. 17 April 2026

pemerintah dimaksudkan agar dapat memaksimalkan berbagai penyelenggaraan yang berkaitan dengan fungsi – fungsi pokok pemerintahan menyangkut pelayanan atau servis.³⁶

Dalam sebuah wawancara dengan Wali Kota pertama Banjar, yaitu Dokter Herman, beliau menyebutkan bahwa diawal masa pemerintahannya sebagai Wali Kota, kondisi Banjar begitu memprihatinkan dengan ditandai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pertama yang hanya sebesar Rp.90 miliar dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.4 miliar dengan pendapatan paling tinggi dari Rumah Sakit yaitu sebesar Rp.2 miliar pada tahun 2004. Wilayah daerah yang terbatas juga menyebabkan semakin berkurangnya sumber-sumber pendapatan daerah pemekaran, terlebih yang pendapatan nya hanya berasal dari sektor perpajakan.³⁷ Dengan tantangan dari masyarakat yang menginginkan secepatnya ada perubahan dalam bidang Kesehatan, dijawab langsung oleh Dokter Herman dengan cara menggratiskan retribusi atau beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien yang akan melakukan cek Kesehatan di Puskesmas yang dana tersebut diambil langsung dari tunjangan Wali Kota.

Pada saat itulah terpikir bahwa Banjar ini harus dibangun secepatnya, walaupun dana tersebut harus mencari dan juga melakukan lobi-lobi ke Parlemen, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan hingga Pemerintahan Pusat, agar pengalokasian dana anggaran ke pemerintahan Banjar meningkat. Hal ini berdampak positif karena pada akhirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjar meningkat cukup pesat di tahun 2005 yaitu sebesar Rp.130.6 Miliar dengan dibarengi kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.13,3 Miliar, serta mendapat dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang mencapai Rp.94,2 Miliar.

Sementara itu pada aspek perekonomian, hasil penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bekerja sama dengan United Nations

³⁶ Elyawati. (2008) *Alasan Elit-Elit Lokal Mengupayakan Pemekaran Wilayah Studi Kenagarian Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok*. Skripsi Universitas Andalas

³⁷ Pramidya Haji, A. (2015). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah Provinsi (Studi pada Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara)*. International Journal of Social and Local Economic Governance. hlm 146

Development Program di tahun 2008, menemukan bahwa daerah otonom baru memiliki capaian Produk Domestik Regional Bruto yang rendah dengan jumlah persentase jumlah penduduk miskin yang tinggi dibandingkan dengan daerah induknya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur penunjang antara lain jalan, kurangnya akses Pendidikan hingga prasarana ekonomi yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat miskin. Maka dari itu Dokter Herman membuat sebuah rincian atau fokus utama pembangunan pada bidang tata ruang dan pemukiman dengan mendapat Rp.11,028 Miliar, disusul dari bidang pendidikan mencapai Rp.9,4 Miliar dan yang terakhir ada pada bidang pekerjaan umum yang mencapai nominal Rp.9,4 Miliar.³⁸

Kondisi pengalokasian dana ini disebabkan karena adanya beberapa tuntutan dan juga aspirasi dari masyarakat Banjar yang menginginkan segera pembenahan terhadap struktur pelayanan. Maka dari itu, Pemerintahan Kota Banjar saat itu lebih menekankan pada bidang yang paling banyak atau paling dekat dirasakan oleh masyarakat yakni bidang infrastruktur, Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan melalui salah satu caranya pendidikan yang didalamnya meliputi juga sarana dan prasarana di pemerintahan demi berjalannya sebuah pelayanan yang optimal kepada masyarakat Banjar.

3.2 Pertumbuhan Ekonomi di Masyarakat

Kota sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat selalu erat kaitannya dengan interaksi dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ini biasanya kota berfungsi sebagai tempat yang berfungsi sebagai pasar atau penyalang antara konsumen yang ada di Kota dengan produk dari daerah pedesaan. Pembangunan kota bisa berdampak positif terhadap penduduk di sekitar kota dalam memperoleh pekerjaan. Transformasi struktural dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern adalah ditandai dengan pergeseran kegiatan ekonomi dari sifat agraris menjadi sektor industri, dari yang semula bergantung terhadap alam, kini menjadi bergantung terhadap manusia. Namun sektor pertanian masih menjadi

³⁸ Undang Sudrajat, *Banjar Satu Dekade Resep Manjur Kepemimpinan Dokter Herman*. (Garut: YAF Publish), hlm 60

salah satu tumpuan utama dari pendapatan nasional, dalam pergeserannya ke kegiatan yang ada di sektor industri, maka terjadilah pertumbuhan sektor industri yang lebih cepat dari pertumbuhan yang ada pada sektor pertanian.

Wilayah perkotaan pada umumnya memiliki kecenderungan akan lemahnya potensi di bidang pertanian, namun hal tersebut tidak terjadi bagi Kota Banjar. Kota dengan luas lahan pertanian yang cukup subur dan juga dengan dibarengi irigasi yang bagus membuat Kota Banjar ini maju dalam sektor pertanian. Meskipun berstatus sebagai daerah perkotaan, mayoritas kegiatan perekonomian masyarakat Kota Banjar Sebagian besar masih mengandalkan sektor yang berbasis pertanian. Pertanian tersebut seperti: perkebunan, peternakan, perikanan, dan hal lainnya. Sebagai kota agropolitan, kegiatan perekonomian masyarakat Kota Banjar juga sangat berpeluang nantinya dapat dikembangkan lebih luas ke dalam bidang bisnis berbasis pertanian (agrobisnis), seperti agroindustri dan jasa-jasa pertanian, agrowisata, serta koleksi dan juga distribusi produk-produk untuk pertanian.

Produktivitas padi dan palawija di Kota Banjar terus mengalami peningkatan. Rata-rata jumlah produksi padi di Kota Banjar menurut katalog yang berjudul Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjar yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik selama 5 tahun terakhir yaitu dalam rentang tahun 2003 sampai 2008 mencapai sebanyak 37 ribu ton, dengan produktivitas sebesar 6,1 ton per hektar. Namun jika dapat disimpulkan dari hasil data tersebut, total jumlah hasil produksi padi tersebut, hanya mampu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Banjar saja, dengan menjamin stok kebutuhan penduduk sekitar 0,6 kg padi (kurang lebih setara dengan 0,3 kg beras) per kapita per hari, jumlah tersebut sudah lebih dari cukup. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan Kota Banjar relatif cukup kuat dan mampu berdiri dari kekuatan produksi pangan wilayah Banjar itu sendiri, bahkan sisanya masih dapat dikirim ke daerah tetangga.

Namun di sisi lain, wilayah Kota Banjar ini memiliki suatu kelebihan lain yang jarang sekali terdapat pada Daerah Otonom Baru, sehingga hal inilah yang kemudian sangat berperan aktif dalam pengembangan perekonomian daerah. Diantaranya ada di sektor industri pangan, industri pengolahan kayu dan juga industri-industri yang tentunya dapat membantu sendi perekonomian masyarakat

Banjar. Industri merupakan suatu kegiatan dalam sistem perekonomian dari kegiatan manusia dalam menggabungkan atau mengolah bahan-bahan dari sumber lingkungan sehingga menghasilkan barang yang bisa bermanfaat untuk kebutuhan manusia.³⁹ Selain di sektor perindustrian, sektor jasa dan perdagangan ikut andil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar, karena memanfaatkan kondisi geografis Kota Banjar yang cukup strategis, yang di apit oleh dua Provinsi, Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan suatu daerah dalam struktur Negara Indonesia pada dasarnya merupakan suatu subsistem yang dimaksudkan agar nantinya dapat meningkatkan pelayanan publik sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan.⁴⁰

Berikut ini merupakan data dari Produk Domestik Regional Kota Banjar atas dasar harga konstan 2000 dalam rentang tahun 2003-2008 (Milyar Rupiah). Data di bawah ini diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Banjar :

Tabel 3.1 jenis lapangan usaha berdasarkan pendapatan Milyar Rupiah

Lapangan Usaha	Tahun					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
A.Primer	185.33	202,05	212.98	218.34	234.64	254.32
1. Pertanian	181.54	198.09	208.95	214.20	230.44	249.82
2. Pertambangan dan Penggalan	3.79	3.96	4.03	4.13	4.20	4.50
B. Sekunder	172,27	189.37	203.55	219.44	253.45	283.04
3. Industri Pengolahan	114.09	126.93	132.98	141.49	155.47	170.52
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	9.58	10.71	11.63	12.62	13.79	15.18
5. Bangunan	48.60	51.73	58.94	65.33	84.20	97.34
C. Tersier	528.68	580.46	624.85	696.91	801.93	896.20
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	263.70	289.70	317.87	363.03	415.09	459.66

³⁹ Hendro. (2011), *Dasar-Dasar Kewirausahaan, Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*. hlm.20

⁴⁰ Marbun, B. N. (2010). *Otonomi Daerah 1945-2010. Proses dan Realita*. Pustaka Sinar Harapan

7. Pengangkutan dan Komunikasi	73.56	78.31	83.77	89.64	94.98	102.62
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	58.72	64.59	69.47	74.75	81.14	87.65
9. Jasa - Jasa	132.70	147.86	153.74	169.49	210.72	246.27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjar 2003 – 2008

Dalam tabel tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) sektor, yaitu :

1. Sektor Primer: Sektor ini merupakan sektor yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya dapat mendayagunakan sumber-sumber seperti tanah dan segala aspek yang terkandung di dalamnya.
2. Sektor Sekunder: Sektor yang mengolah bahan baku dari sektor primer maupun sektor sekunder itu sendiri.
3. Sektor Tersier: Sektor yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa.

Dalam tabel tersebut menyajikan data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dalam 3 (tiga) kelompok sektor. Terlihat dalam data tersebut, kelompok yang ada pada sektor tersier seperti perdagangan, hotel, jasa angkutan, keuangan, masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kota Banjar selama periode 2003-2008. Nilai tersebut terus berjalan sampai hampir mencapai satu triliun di tahun 2008. Hal tersebut yang membuktikan bahwa, Kota Banjar ini mampu bisa lebih mandiri setelah menjadi daerah otonom baru.

Jika secara umum, dapat pula ditarik kesimpulan bahwa struktur ekonomi Kota Banjar, masih didominasi oleh kemajuan yang ada pada sektor perdagangan, hotel, dan juga restoran, serta didukung pula oleh peranan dari sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretariat Daerah Kota Banjar, Bapak Dr. H. Soni Harison. Beliau menjelaskan bahwa Kota Banjar ini masih bertumpu pada sektor industri, jasa dan perdagangan. Karena Banjar ini merupakan daerah yang cukup strategis, maka wilayah ini sering dijadikan gudang oleh beberapa perusahaan besar seperti PT. Wings, PT. Djarum dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang

menjadikan wilayah ini sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang, sebelum barang tersebut di edarkan ke beberapa wilayah tetangga seperti Kabupaten Pangandaran, Cilacap, Ciamis dan wilayah-wilayah lainnya yang ada di sekitar Banjar. Keempat sektor inilah yang kemudian dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Kota Banjar dalam kurun waktu 2003-2008, karena memiliki kontribusi paling besar terhadap jumlah peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjar. Hal tersebut menunjukkan bahwa citra daerah Kota Banjar terhadap wilayah lain yaitu sebagai kota perdagangan dan jasa, serta wilayah pengembangan industri yang cukup menjanjikan, namun dengan tetap tidak mengesampingkan pada sektor pertanian. Sehingga itu semua, dapat sejalan dengan visi Kota Banjar yaitu “Terwujudnya Kota Banjar yang Berlandaskan Iman dan Takwa sebagai Pintu Gerbang Jawa Barat 2010”.

Hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut juga disertai dengan pergeseran masyarakat, atau istilah umumnya disebut juga sebagai urbanisasi. Masyarakat berbondong beralih atau bergeser pada wilayah yang paling banyak menyediakan lapangan pekerjaan, dengan kata lain mereka lebih memilih dan menetap tinggal dekat dengan pekerjaan mereka, misalnya masyarakat dari Desa ke Kota.⁴¹

⁴¹ Astuti, P. (2010). *Pengaruh Perkembangan Kota Surakarta Terhadap Pemukiman di Kawasan Solo Baru.*, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.